

BERITA ACARA  
HASIL KESEPAKATAN RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KOPERASI, UKM  
PROVINSI JAMBI TAHUN 2022

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juli Tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi telah di selenggarakan Verefikasi Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, UKM Tahun 2022 Provinsi Jambi yang dihadiri oleh:

- 1. Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi
- 2. Sekretaris Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi
- 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi
- 4. Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi
- 5. Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi
- 6. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi

Setelah dilakukan pembahasan terhadap:

- 1. Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi tahun 2022
- 2. Pagu indikatif program dan Kegiatan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi tahun 2022

Peserta Verefikasi Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2022

MENYEPAKATI:

- KESATU : Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.
- KEDUA : Pagu indikatif Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi tahun 2022
- KETIGA : Pagu Indikatif Program dan Kegiatan pada lampiran Berita Acara ini merupakan bahan pertimbangan pada tahap pembahasan selanjutnya.

Demikian Berita Acara ini dubuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi , 25 Juli 2022

Kepala  
Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi

Sekretaris  
Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi

.....

.....

3. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi  
Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi

4. Kepala Bidang Kelembagaan  
Dinas Koperasi, UKM Provinsi  
Jambi

.....

.....

6. Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan  
Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi

6. Kepala Bidang UKM  
Dinas Koperasi, UKM  
Provinsi Jambi

.....

.....



**K E P U T U S A N GUBERNUR JAMBI NOMOR:  
/KEP.GUB/DISKOP.UKM-1.3/VIII/2022**

**TENTANG**

**A. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 DAN RENCANA KERJA TAHUN 2023 PADA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI**

**B. GUBERNUR JAMBI**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a dan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.

#### MEMUTUSKAN:

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 pada Dinas Koperasi Provinsi Jambi, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan data dan informasi terkait dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023
  - b. Menyusun dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023; dan
  - c. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal        Agustus 2022

**GUBERNUR JAMBI,**

**H. AL HARIS**

Tembusan:

1. Gubernur Jambi
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jambi;
3. Kepala Bappeda Provinsi Jambi; 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
5. Anggota Tim.

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR : /KEP.GUB/DISKOP.UKM-1.3/  
**VIII/2022**

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DAN RENCANA KERJA TAHUN 2023 PADA  
DINAS  
KOPERASI, UKM PROVINSI JAMBI

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN  
2022 DAN RENCANA KERJA TAHUN 2023 PADA DINAS KOPERASI, UKM  
**PROVINSI JAMBI**

- I. Ketua Tim : Kepala Dinas, UKM Provinsi Jambi
- II. Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas, UKM Provinsi Jambi
- III. Kelompok Kerja :
  - a. Ketua : DR. Puti Oryzawati,SH.,M.H
  - b. Wakil Ketua : J.Ilyas.M,SE,M.Si
  - c. Sekretaris : Zuhriyani,ST., M.Si
  - d. Anggota :
    - 1. Maryati, SH
    - 2. Drs. H.M.Taufik,M.Pd
    - 3. Hj. Emawati, SE,MM.
    - 4. Inneka Verianingsih,S.S.T,M.E.Sy.
    - 5. Ari Nopriansah,S,STP,MH.
    - 6. Zuffran Ibrahim, SE.
    - 7. Ahmad Dimata, SE.
    - 8. Kadiman, S.E.
    - 9. Nellyati Hasibuan,SE.
    - 10. Muhammad,SE.
    - 11. Mardiansyah,SE.
    - 12. Novita,SE
    - 13. Sri Eka Yanti,M,S.Pt,ME
    - 14. Doni, SE
    - 15. Kurniawan,SE
    - 16. Susilo Adinata,SE.

**GUBERNUR JAMBI,**

**H. AL HARIS**


## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan Hidayah- Nya maka “ Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Laporan ini merupakan rancangan awal dalam rangka penyusunan RKPD-Perubahan Tahun 2022, yang berisikan 8 (delapan) program prioritas dan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi dalam rangka Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Provinsi Jambi yang bersumber pembiayaan berasal dari APBD Provinsi Jambi.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 ini di susun untuk dapat menjadi acuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jambi.

Jambi, Juli 2022  
Kepala Dinas



Hamdan, SH.,M.Si  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19630421 198503 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Landasan Hukum .....	2
1.3	Maksud dan Tujuan .....	5
1.4	Sistematika Penulisan .....	6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra .....	9
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	25
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	33
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	42
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	44

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN .....

3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	53
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	60
3.3	Program dan Kegiatan Tahun 2023 .....	

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2022 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan berpedoman pada :

- a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- c. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;

- d. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- e. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005- 2025;
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 ;
25. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi;
26. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari disusunnya Renja Perubahan adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2022
2. Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
  - a) Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan
  - b) Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
  - c) Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2022 disusun sebagai berikut:

#### Bab I. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

#### Bab II. Evaluasi Perubahan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

#### Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab ini memuat Tujuan Sasaran, Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022, dan Rancangan Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2022

#### Bab IV. Rencana Perubahan dan Pendanaan

#### Bab V. Penutup

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD JAMBI TRIWULAN II TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra

Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2022 ini merupakan Renja tahun Pertama dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2021– 2026. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta obyek pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi, maka dalam pelaksanaannya diperlukan ditetapkan indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Pada periode Renstra sebelumnya yaitu Renstra 2016 – 2021, sampai dengan akhir periode renstra secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerjanya yang berhasil direalisasikan. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam RKPD dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan.

Dari data pelaksanaan Renja Tahun 2021, secara umum pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai indikator kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun disamping itu masih terdapat indikator kinerja yang belum sesuai target yang disebabkan beberapa faktor. Terhadap capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi 2021- 2026, disimpulkan telah sesuai dengan perencanaan walaupun masih terdapat catatan-

catatan untuk beberapa indikator yang perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan agar tidak keluar dari target yang direncanakan. Dan terhadap target capaian di akhir periode Renstra memiliki peluang yang besar untuk tercapai.

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja pada tahun 2021 antara lain dikarenakan kegiatan tersebut telah direncanakan dengan baik; proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan lebih awal, waktu pelaksanaan terkontrol dengan baik; kerjasama dengan banyak pihak dalam pelaksanaannya dan komponen pendukung kegiatan sebagian besar ada di sekitar sehingga memudahkan untuk pemanfaatannya. Sementara, faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program / kegiatan:

- 1) Adanya Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020, tentunya menyebabkan program, kegiatan dan subkegiatan tidak dapat terlaksana sebagaimana direncanakan. Target dan capaian tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Pandemi membuat beberapa kegiatan yang sedianya dilaksanakan secara tatap muka tidak dapat dilaksanakan sebagaimana biasa karena adanya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat demi mencegah penularan Covid-19 lebih besar.
- 2) Adanya refocusing anggaran tahun 2021 di Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi menyebabkan dilakukan penyesuaian dengan memprioritaskan kegiatan untuk penanganan Covid-19 dan pencapaian target sasaran serta program yang tertuang dalam dokumen RPJMD, terlebih pemenuhan target yang belum tercapai.
- 3) Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait adanya pembatasan beberapa kegiatan yang digolongkan dapat memicu kerumunan menyebabkan beberapa kegiatan di Dinas Koperasi, UKM Provinsi

Jambi tetap terlaksana tetapi metodenya berubah secara virtual atau daring.

- 4) Terbatasnya jumlah pegawai Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dengan banyaknya ASN Dinas Koperasi, UKM yang memasuki usia pensiun tanpa ketersediaan pengganti secara proporsional, menyebabkan ketimpangan proporsi sumber daya manusia Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi. Dalam rangka memenuhi target kinerjanya, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi membutuhkan sumber daya manusia dengan kemampuan/kapasitas profesional dan teknis yang memadai dengan intensitas kerja yang cukup tinggi. Idealnya satu jabatan Pengawas didukung oleh 3 (tiga) pelaksana sesuai fungsinya, sehingga meningkatkan profesional kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi. Selain itu juga sangat dibutuhkan jabatan fungsional pengawas koperasi dengan jumlah paling sedikit 6 (enam) pegawai.

Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu:

- 1) Penyesuaian target kinerja dalam perubahan Renja sebagai akibat dari dampak Covid-19;
- 2) Optimalisasi pegawai yang ada dengan distribusi beban kerja dan pelibatan antar unit kerja, serta intensifikasi jam kerja;
- 3) Responsif terhadap terjadinya perubahan peraturan dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah; 4) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, atau praktek dengan tugas khusus; dan
- 4) Melakukan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah kabupaten untuk merespon perubahan peraturan dan kebijakan yang terjadi.



- 6) Mengubah metode pelaksanaan kegiatan dengan melakukan pertemuan atau rapat virtual dan mengoptimalkan penggunaan teknologi IT.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021 selengkapnya diuraikan sebagaimana Tabel 2.1. di bawah ini:

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Predikat AKIP Pemerintah Daerah	A	B	B	B	100%		BB	BB
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersediannya Dokumen Perencanaan	100%		100%	100%	100%		100%	100%
2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	40%
2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan		-	-		2 Laporan	2 Laporan	20%
2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-			-	-
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%		100%	100%	100%		100%	100%

2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/Bulan		60 Orang/Bulan	60 Orang/Bulan	100%	60 Orang/Bulan	60 Orang/Bulan	85,71%
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS yang disiplin dan Mengikuti Pelatihan	100%		100%			100%	100%	100
02.17.01.1.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 Paket		-			-	-	
2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang		60 Orang	60 Orang	100	60 Orang	60 Orang	100
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		100%	100%	100%			
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	100%	10 Paket	10 Paket	100
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100
2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400 Pkaet		400 Pkaet	400 Pkaet	100%	400 Pkaet	400 Pkaet	100
2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	100%	15 Paket	15 Paket	100
2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Paket		-			-	-	
2.17.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan		-			-	-	
2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		100%	100%		100%	100%	100%
2.17.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 unit mobil dan 3 unit motor		-			-	-	

2.17.01.1.07,02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit mobil		-			-	-	
2.17.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Item		2 Paket	2 Paket	100%	-	2 Pkaet	40%
2.17.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 item		4 Pkaet	4 Paket	100%	4 paket	4 paket	100%
2.17.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%							
2.17.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket		-			-		
2.17.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 item		-			-		
2.17.01.1.07.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%							
2.17.01.1.08,01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	20%
2.17.01.1.08,02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	20%
2.17.01.1.08,03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	20%
2.17.01.1.08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	20%
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		100%			100%	100%	100%
2.17.01.1.09,01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	100%	37 Unit	37 Unit	100%
2.17.01.1.09,02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	2 Unit		-			-		

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
2.17.01.1.09,05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di perbaiki	2unit		-			-		
2.17.01.1.09,06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit		70 Unit	70 unit	100%	70 Unit	70 unit	100%
2.17.01.1.09,09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
2.17.01.1.09,10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		-			-		
2.17.01.1.09,11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		-			-		
<b>2.17.02</b>	<b>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</b>	Jumlah penyelesaian n perizinan usaha simpan pinjam	151 KSP/USP							
2.17.02.1,01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah penyelesaian perizinan usaha simpan pinjam	151 KSP/USP		20 KSP	20 kSP	100%	20 KSP	40 KSP	26,49%
2.17.02.1,01,01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	40 Koperasi (132 orang)		-	-		20 koperasi	20 koperasi	
		Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi bagi Pembina dan Pengurus/Pengelola KSP/USP Kab /Kota								
		Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek Penyusunan Pelaporan Keuangan Koperasi Berbasis Aplikasi Akuntansi Bagi Pembina dan Pengurus /Pengelola Koperasi Kab/Kota								

		Sosialisasi sistem pelayanan perizinan usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang melalui OSS secara terintegrasi bagi pembina dan pengurus KSP/USP di wilayah Provinsi Jambi	8 kali (200 orang)							
		Jumlah Koperasi yang mengikuti Bimtek tentang Akuntansi Koperasi								
		Jumlah Koperasi yang mengikuti Bimtek tentang Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi								
2.17.02.1,02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/	Jumlah Penyelesaian Perizinan Kantor cabang , Kantor cabang , Kantor Cabang Pembantu pembantu	3 Kantor Kas/Kantor Cabang/Kas Pembant							
2.17.02.1,02.01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3 Unit							
2.17.02.1,02.01	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1							
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkinerja Baik	0.50		-					
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Yang Dinilai Kepatuhan	134 Unit/Usah a	20 koperasi	20 koperasi	100%		20 koperasi	20 koperasi	
2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	3 Dokumen							

	ke pada Anggota dan Masyarakat									
2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Terbentuk Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	120 Unit Usaha	20 koperasi	20 koperasi	100%		20 koperasi	40 koperasi	40%
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi								
2.17.03.1.02.01	Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	125 koperasi	20 koperasi	20 koperasi	100%		20 koperasi	40 koperasi	40%
<b>2.17.04</b>	<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>	<b>Persentase Koperasi sehat dan Cukup Sehat</b>	0.50							
2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	25 koperasi							
2.17.04.1.01.01	Penilaian Permodalan, kualitas Aktiva, Produktif, Manajemen Efisiensi Likuiditas, Jadidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	121 Unit Usaha	20 koperasi	20 koperasi	100%		20 koperasi	40 koperasi	40%
2.17.04.1.01.02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan								
<b>2.17.05</b>	<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	Persentase SDM Aparatur, Pelaku Usaha Koperasi dan UKM yang mendapatkan pelatihan setiap tahun	<b>0.25 (25%)</b>							
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi	Persentase SDM Aparatur, Pelaku Usaha	<b>0.25 (25%)</b>							

	Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Koperasi dan UKM Yang Mendapatkan Pelatihan setiap tahun								
2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2500 Orang	500 orang	500 orang	100%		500 orang	1000 orang	40%
	Jumlah peserta pelatihan keterampilan teknis									
	Jumlah peserta pelatihan Perkoperasian									
	Jumlah peserta pelatihan Kewirausahaan									
	Jumlah peserta pelatihan Manajerial									
	Jumlah peserta pelatihan Teknologi Informasi									
	Jumlah peserta pelatihan Kompetensi Perkoperasian									
	Jumlah peserta pembekalan tenaga pendamping									
2.17.05.1.02	Pendidikan dan Latihan UKM yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM		450 Orang							
<b>2.17.06</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	<b>Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi (119 Koperasi Aktif)</b>	<b>23,45%</b>							
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									
2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan,	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi								



	Penataan Manajumen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	dan Restrukturisasi usaha								
		Jumlah Pelaksanaan Rakor Evaluasi Perkembangan Program LPDB	6 kali							
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kemitraan Usaha Koperasi	6 kali							
		Jumlah Pelaksanaan FGD Perlindungan dan penguatan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota	6 kali							
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota	5 kali							
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pemasaran usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota	5 kali							
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pendampingan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota	5 kali							
2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha								
		Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kelembagaan	1 kali							
		Jumlah Sosialisasi / penyuluhan tentang perkoperasian bagi masyarakat	25 kali							
		Jumlah bimtek manajemen perkoperasian bagi PPKL	5 kali							
		Jumlah Rakor Sinkronisasi Data KUMKM se Provinsi Jambi	5 kali							

		Jumlah kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi bagi koperasi berkualitas	5 kali							
		Peringatan Hari Koperasi Nasional tk nasional dan Provinsi	1 kali							
		Rakor Pemetaan Pertumbuhan Koperasi Baru di wilayah Kab/Kota Se provinsi Jambi bagi Pembina	4 kali							
		Jumlah dokumen data koperasi dan UMKM	10 Dokumen							
2.17.06.1.01.03	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	60 Keluarga							
<b>2,17.07</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>Persentase Peningkatan UMKM Binaan (72,126 UMKM)</b>	27,6%							
2,17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku kKKeperluan	<b>Persentase Peningkatan UMKM Binaan (72,126 UMKM)</b>								
2,17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan								
		Jumlah pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan peningkatan kualitas Produk Unggulan / Andalan Provinsi Jambi	100 orang							

		Jumlah pelaksanaan Kegiatan Desiminasi Sertifikasi Produk Halal								
		Jumlah pelaksanaan Kegiatan Desiminasi Perizinan BPOM	1 kali							
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan HKI Bagi UMKM	1 kali							
		Jumlah Pelaksanaan Rakor SHAT bagi UMKM	2 kali							
		Jumlah Pelaksanaan Pelaksanaan Rakor SIKP	1 kali							
		Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan pelatihan peningkatan mutu produk/Pemasaran berbasis teknologi (e-commerce)	150 UMKM							
		Jumlah UMKM Penerima Bantuan Modal/ Peralatan	9220 UMKM							
2,17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	1200 orang							
<b>2,17.08</b>	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan</b>	0.09							
2,17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah									
2,17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknolog	700 unit usaha							
		Jumlah promosi /pameran yang diikuti	35 kali							
		Jumlah UKM yang di fasilitasi mengikuti pameran	20 UKM							
		Jumlah fasiliti gelar produk bagi UMKM	12 lkali							

		Jumlah UKM yang di promosikan melalui media cetak /elektronik	10 UMKM							
		Jumlah aplikasi promosi UKM	1 aplikasi							
2,17.08.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	140 orang							

Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 Dinas Koperasi,UKM

Provinsi Jambi

- a. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 urusan, 8 program dengan 8 indikator kinerja program, dan 20 kegiatan dengan 20 indikator kinerja kegiatan.
- b. Dari 8 indikator kinerja program, terdapat 5 indikator yang melampaui target, 3 indikator memenuhi target.
- c. Dari 20 indikator kinerja kegiatan, seluruh indikator telah memenuhi target.

2. Perkiraan Capaian Target Review Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi

- a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 8 program dengan 8 indikator program dan 20 kegiatan dengan 20 indikator.
- b. Dari 8 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 8 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra.
- c. Dari 20 indikator kinerja kegiatan diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Program pembangunan Provinsi Jambi diantaranya adalah untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif dan pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Jambi. Salah satu pola yang sesuai dengan pembangunan yang berorientasi kepada rakyat adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang berorientasi pada peningkatan partisipasi produktif masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi.

Pihak yang paling berperan dalam pengembangan koperasi dan UMKM dalam pembangunan ekonomi di Jambi adalah Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi. sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. yang memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi di bidang Koperasi dan UKM serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Tugas yang diamanatkan kepada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi. memegang peran yang strategis dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM di Provinsi Jambi. Hasil pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang ditargetkan dengan tolak ukur keberhasilan yang tercermin dalam indikator-indikator makro. Hasil-hasil pembangunan sektor koperasi dan UMKM tercermin dari indikator makro seperti: PDRB, pertumbuhan koperasi, persentase peningkatan kemitraan, pertumbuhan volume usaha.

Secara rinci fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi adalah :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. Pengoordinasian kegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan instansi terkait;

- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- e. Penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- f. Pelaksanaan pengorganisasian pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi dan usaha kecil yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. Pelaksanaan pengorganisasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- h. Pelaksanaan pengorganisasian pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- i. Pelaksanaan pengorganisasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- j. Pelaksanaan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- k. Pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, serta ketatausahaan;
- l. Pelaksanaan pengarahan kegiatan bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah kepada bawahan;
- m. Pelaksanaan pembinaan tugas dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- n. Pengevaluasian program kegiatan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah secara berkala dan;

- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Upaya Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan Bidang Koperasi dan UKM yang sesuai dengan fungsi diatas dapat dilihat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Persentase koperasi berkualitas
2. Meningkatkan pertumbuhan volume usaha koperasi
3. Meningkatnya usaha kecil menjadi wirausaha
4. Meningkatnya persentase pertumbuhan omset UMKM Binaan
5. Meningkatnya persentase pertumbuhan aset UMKM Binaan
6. Meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

- 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
- 2) Tersedianya dokumen perencanaan;
- 3) Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang Koperasi dan UMKM;
- 4) Fasilitasi Pembiayaan bagi KUMKM
- 5) Fasilitasi Pelatihan bagi SDM KUMKM
- 6) Pemanfaatan PLUT, Tenaga Pendamping Koperasi dan PPKL
- 7) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.



Berdasarkan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi melaksanakan Urusan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi terdapat dalam Tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi**  
**Tahun 2021**

				Target Renstra Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Catatan Analisis
No	Indikator	Target SPM	IKK	2021	2022	2021	2022	
<b>1</b>	Persentase Koperasi Berkualitas		Peningkatan Perkembangan Koperasi Berkualitas	17 %	5.4 %	5,13%	0 %	
<b>2</b>	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi		Peningkatan Perkembangan Volume Usaha Koperasi	0,35 %	0,03 %	(11,19%)	0 %	
<b>3</b>	Persentase Usah Kecil Menjadi Wirausaha		Peningkatan Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	-	3.29 %	4%	0 %	
<b>4</b>	Persentase Pertumbuhan Omset UMKM binaan		Peningkatan Omset UMKM binaan	0,14 %	0,07 %	9,23%	<b>0 %</b>	
<b>5</b>	Persentase Pertumbuhan Asset UMKM binaan		Peningkatan Asset UMKM binaan	0,20 %	0.57 %	43,3%	0 %	

6	Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja UKM		Peningkatan Pernyerapan Tenaga Kerja	0,57 %	0,57%	170,24%	0 %	
---	--	--	--	-----------	-------	---------	-----	--

Analisis atas capaian Indikator Kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Persentase Koperasi Berkualitas

Data perkembangan koperasi tahun 2021, menunjukkan jumlah koperasi yang ada di wilayah Provinsi Jambi sebanyak 3.838 unit, dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 2.045 unit, ini menunjukkan adanya penurunan dibanding tahun sebelumnya 2020 dimana jumlah koperasi aktif sebanyak 2.185 unit, dari data tersebut dapat dilihat persentase penurunan jumlah koperasi aktif sebesar 6,4 persen. Koperasi Aktif adalah koperasi yang kelebagaannya berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dan usahanya berjalan dan ada transaksi usaha. Dari total koperasi aktif sebanyak 2.045 unit, koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk tahun 2021 adalah sebanyak 431 unit , Pada tahun 2020 jumlah koperasi yang melakukan RAT sebanyak 247 unit data ini menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 184 unit atau meningkat sebesar 74,49 persen, sedangkan untuk penilaian kesehatan koperasi yang dilakukan pada tahun 2021 sebanyak 105 unit koperasi, dengan hasil koperasi sehat sebanyak 50 unit, cukup sehat 55 unit.

Terjadinya mutasi pegawai (petugas penilai kesehatan) dikabupaten/kota mengakibatkan penurunan kinerja pelaksanaan penilaian kesehatan itu sendiri. Tidak tercapainya beberapa target pelaksanaan penilaian kesehatan dikabupaten/kota dikarenakan ada beberapa KSP/USP Koperasi yang tidak memenuhi persyaratan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi.

Untuk melihat persentase Koperasi Berkualitas maka dapat dilihat dari perbandingan jumlah koperasi sehat dan cukup sehat dengan jumlah

koperasi aktif maka persentase Koperasi Berkualitas diperoleh 5,13 persen untuk tahun 2021, hal ini masih dibawah target indikator kinerja. Hal ini terjadi karena dari masih tingginya jumlah koperasi yang tidak aktif yaitu 46,72 persen dari koperasi yang ada dan rendahnya koperasi aktif yang melaksanakan RAT yaitu hanya 21,07 persen dari jumlah koperasi yang aktif.

Penyebab dari tingginya koperasi yang tidak aktif dan rendahnya koperasi yang melaksanakan RAT antara lain :

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Pembina Koperasi
2. Kurangnya komitmen Pembina, pengurus dan anggota koperasi dalam mencapai tujuan dari koperasi yaitu mensejahterakan anggota nya.
3. Masih rendahnya SDM Pengurus Koperasi dalam memahami dan menjalankan system baik itu manajemen maupun keuangan
4. Masih ada anggapan dari pengurus bahwa RAT tidak penting serta kurang pedulinya anggota terhadap pelaksanaan RAT., hal ini masih dibawah target indikator kinerja.

b. Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

Volume usaha merupakan total nilai penjualan atau pendapatan barang dan jasa pada tahun buku yang bersangkutan. Untuk melihat pertumbuhan volume usaha koperasi dapat dilihat dari data perkembangan volume usaha koperasi, dimana pada tahun 2020 volume usaha berjumlah Rp. 1.268.422.128.641,- dan pada tahun 2021 volume usaha koperasi menjadi Rp.1.126.451.978.948,- ini menunjukkan adanya penurunan volume usaha dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sekitar 11,19 persen. Hal ini disebabkan ketidakstabilan harga komoditi perkebunan (Sawit dan Karet) sehingga KUD-KUD yang bergerak di beberapa perkebunan mengalami penurunan volume usaha koperasi ditambah juga oleh Pandemi Covid-19.

c. Persentase Pertumbuhan Omset UMKM binaan

Omset adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh semua pelaku usaha. Untuk mendapatkan omset penjualan yang tinggi tentu harus dilakukan guna mempertahankan kelangsungan usaha diantaranya dengan memperhatikan kualitas produk, melakukan promosi, layanan terbaik serta melakukan strategi pemasaran.

Pertumbuhan Omset UMKM menjadi salah satu dari indikator kinerja dengan target 0,15 persen. Untuk Omset UMKM terjadi perkembangan dimana pada tahun 2020 berjumlah Rp. 4.091.883.904.323,- menjadi Rp. 4.469.447.291,- di tahun 2021 hal ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu meningkat sekitar 9,23 persen. Persentase pertumbuhan Omset UMKM tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan dari indikator kinerja.

d. Persentase Pertumbuhan Asset UMKM binaan

Pertumbuhan yang pesat dan fokus pada inovasi membuat usaha kecil menjadi yang terbaik, sehingga terdapat potensi bagi usaha kecil yang diharapkan akan terus berkembang dimasa depan.

Untuk pertumbuhan Asset UMKM terjadi peningkatan, dimana pada tahun 2020 Asset UMKM Rp. 2.479.271.316.879,- meningkat menjadi Rp. 3.552.874.671.472,- di tahun 2021 atau meningkat sekitar 43,30 persen. Persentase asset UMKM ini meningkat melebihi dari target yang ditetapkan dari indikator kinerja.

d. Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja UKM

e. UMKM selain diharapkan memiliki kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan juga memiliki kontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat ikut menurunkan tingkat pengangguran dan menciptakan stabilitas ekonomi makro nasional.

f. Adapun Penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan yaitu tahun 2020 berjumlah 101.972 orang menjadi 275.577 orang di tahun 2021 atau meningkat sebesar 170,24 persen. Ini menunjukkan bahwa persentase

pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM melebihi dari target yang ditetapkan pada indikator kinerja.

**Tabel 2.2****Perkembangan Kelembagaan Koperasi 2019 s.d Mei 2022**

U R A I A N	SATUAN	CAPAIAN TAHUN			
		2019	2020	2021	Mei 2022
Perkembangan Koperasi					
Jumlah Koperasi	Unit	3.551	3.725	3.838	3.874
Koperasi Aktif	Unit	2.529	2.185	2.045	2.072
Koperasi Tidak Aktif	Unit	1.022	1.540	1.793	1.802
Jumlah NIK	Unit	414	434	485	502
Jumlah Anggota	Orang	362.253	50.164	111.092	106.235
Koperasi yg melaksanakan RAT	Unit	652	247	431	372
Jumlah Pengurus	Orang	10.073	31	1.297	
Modal Sendiri	Rp.	492.747.416.250	234.578.250.250	360.308.731.817	
Modal Luar	Rp.	175.393.608.911	101.3293.608.911	244.766.692.077	
Volume Usaha	Rp.	2.016.618.384.395	1.288.422.384.395	1.126.451.978.948	
SHU	Rp.	105.320.167.438	27.782.167	45.484.667.503	

Berdasarkan tabel 2.3 diatas, perkembangan kelembagaan koperasi dari tahun 2019 s.d 2021 dapat diketahui perkembangan jumlah koperasi meningkat namun jumlah koperasi aktif dan koperasi yang melaksanakan RAT dibawah 25 persen dari koperasi aktif. Sampai dengan Mei 2022 jumlah koperasi mengalami peningkatan dari 3.838 menjadi 3.874 dan koperasi aktif dari 2.045 menjadi 2.072. namun untuk koperasi yang melaksanakan RAT mengalami penurunan semula 485 menjadi 372 unit.

**Tabel 2.4**

**Perkembangan UMKM Tahun 2019 s/d 2021**

<b>No</b>	<b>Perkembangan</b>	<b>Satuan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1.	Jumlah Usaha Mikro	Unit	123.160	59.197	152.477
2.	Jumlah Usaha Kecil	Unit	14.170	11.778	10.271
3.	Jumlah Usaha Menengah	Unit	1.140	1.151	2.420
4.	Jumlah Tenaga Kerja Terserap	Org	188.947	101.972	275.577
5.	Jumlah UMKM	Unit	<b>104.155</b>	<b>138.470</b>	<b>165.168</b>

Berdasarkan tabel perkembangan UMKM Tahun 2019 ke tahun 2021 terjadi penurunan pada semua kategori pada tahun 2020 jumlah nya cenderung menurun, hal ini dikarenakan pandemi covid-19 yang terjadi selama 2020, namun kembali meningkat pada tahun 2021. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah pusat dan daerah yang berupaya berbagai program untuk mendorong UMKM terutama usaha mikro untuk bertahan antara lain bantuan BPUM dan PEN.

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi skpd

Jumlah Koperasi dan UMKM yang besar dari segi kuantitas masih belum didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya sehingga kinerja UMKM masih tertinggal. Ketertinggalan kinerja UMKM tersebut disebabkan terutama oleh kekurangmampuan UMKM dalam bidang

manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Tingkat kinerja yang demikian juga berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses ke berbagai sumber daya produktif yang meliputi sumber-sumber permodalan, informasi, teknologi, pasar dan produksi.

Sehubungan dengan itu perlu ada analisis yang berkenaan dengan faktor eksternal dan internal (analisis SWOT) yang berpengaruh terhadap keberlanjutan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi. Faktor internal yang berdampak positif dianggap sebagai kekuatan dan yang berdampak negatif dianggap sebagai kelemahan.

### **1.3.1. Kondisi Saat Ini**

Pengembangan Koperasi, UKM di Provinsi Jambi pada saat ini dipengaruhi oleh :

- 1. Rendahnya produktifitas.** Produktifitas KUMKM masih dinyatakan rendah, sehingga akan menyebabkan skala yang dikelola terutama skala mikro dan kecil belum layak secara ekonomi. Dengan demikian perlu dilakukan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan usahanya. Rendahnya produktifitas ini juga didukung dengan lemahnya penguasaan dibidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM.
- 2. Terbatasnya akses sumber daya produktif.** Usaha mikro dan kecil menghadapi masalah dalam peningkatan kapasitas usahanya, yaitu kurang tersedia collateral apabila akan memperoleh pinjaman/pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan. Dengan demikian perlu dikembangkan skim-skim pembiayaan yang membantu usaha mikro dan kecil, yaitu pembiayaan dengan pola syariah, juga dilakukan pendampingan dalam pemanfaatan pembiayaan tersebut.



3. **Rendahnya kualitas kelembagaan Koperasi.** Akhir-akhir ini beberapa Koperasi belum menjalankan tata kelola koperasi yang baik (good cooperative governance). Hal ini disebabkan bahwa pendirian koperasi belum didasari atas kepentingan dan kesamaan ekonomi yang sama diantara anggota. Namun lebih menekan pada aspek bisnis saja, kurang memperhatikan prinsip-prinsip koperasi yang menjadi landasan operasionalnya. Kelembagaan dan organisasi belum dikelola secara sistem manajemen yang memadai, yaitu sebagian besar belum memiliki rencana jangka menengah dan panjang.
4. **Rendahnya kinerja Koperasi.** Rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi manajemen Koperasi akan menyebabkan kurang optimalnya kinerja Koperasi. Dengan demikian diperlukan beberapa kegiatan usaha yang mengarah pada keterkaitan usaha koperasi dan usaha anggotanya. Disamping itu manajemen koperasi perlu dikelola dengan sistem manajemen yang memadai, yaitu memiliki rencana jangka menengah dan panjang serta mengembangkan manajemen kinerja koperasi dengan model Balanced Score Card (BSC) dengan beberapa penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan karakteristik koperasi.
5. **Kurang kondusifnya iklim usaha,** pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) memerlukan iklim yang kondusif, yaitu prosedur perizinan yang belum dilakukan secara transparan, biaya transaksi perizinan yang mahal, pungutan secara tidak resmi. Peraturan-peraturan yang menghambat perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah dengan berbagai alasan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### 2.3.2. Kondisi yang diharapkan

Untuk mendukung pengembangan Koperasi, UKM di Propinsi Jambi pada saat ini sangat dipengaruhi :

1. **Produktifitas yang tinggi.** Untuk meningkatkan produktifitas perlu dilakukan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan usahanya melalui manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta peningkatan kompetensi kewirausahaan UKM.
2. **Akses sumber daya produktif.** Peningkatan skim-skim pembiayaan yang membantu usaha mikro dan kecil, yaitu pembiayaan dengan pola syariah, juga dilakukan pendampingan dalam pemanfaatan pembiayaan tersebut.
3. **Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi.** Koperasi harus menjalankan tata kelola koperasi yang baik (good cooperative governance) agar koperasi dapat berkembang secara profesional.
4. **Peningkatan kinerja Koperasi.** Kinerja koperasi yang baik akan dapat membantu peningkatan usaha koperasi.
5. **Iklim usaha yang baik,** Iklim usaha yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu prosedur perizinan yang transparan, biaya transaksi perizinan yang murah, tidak adanya pungutan tidak resmi.

### 2.3.3. Kondisi Eksternal

#### 1. Peluang

- Tersedianya regulasi yang mendukung perkembangan koperasi dan UMKM.
- Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan peluang pasar yang besar bagi produk-produk UMKM.
- Banyak program-program yang bergerak di sektor padat karya.
- Tersedianya skema kredit bagi koperasi dan UMKM
- Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja baru

## **2. Ancaman**

- Kondisi infrastruktur (jalan, pelabuhan dan listrik) yang belum memadai untuk mendukung kelancaran arus perdagangan barang/jasa dan kegiatan ekspor/impor perdagangan komoditi antar daerah dan negara.
- Persaingan dengan produk dari luar yang memiliki keunggulan (pasar bebas).
- Keterbatasan pelaku usaha/pelaku bisnis yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi (entrepreneurship).
- Kualitas produk industri kecil dan menengah rata-rata masih rendah.
- Krisis ekonomi dan krisis finansial global yang bersifat multi dimensi cukup berdampak terhadap kinerja ekspor Indonesia, termasuk Jambi.
- Praktek KKN dalam dunia usaha masih sulit dihapuskan, mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

### **2.3.4. Kondisi Internal**

#### **1. Kekuatan**

- Adanya tupoksi dan program kerja Dinas Koperasi, UKM
- Adanya dukungan pembiayaan (APBD/APBN) dan kerjasama stakeholder terkait
- Sarana dan fasilitas yang tersedia dapat digunakan untuk pengembangan koperasi dan UMKM
- Dukungan instansi lainnya seperti BUMN, BUMD.

#### **2. Kelemahan**

- Keterbatasan tenaga fungsional dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan dan penyuluhan koperasi kepada masyarakat maupun gerakan koperasi.

- Sikap kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam berusaha relatif lemah.
- Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mengakses jangkauan pelayanan dan pembinaan terhadap gerakan koperasi dan UMKM
- Sumber-sumber informasi dan pemberitaan yang berkaitan pengembangan dan program koperasi serta UMKM.

#### 2.3.5. Isu Strategis yang dihadapi

Jumlah Koperasi dan UMKM yang besar dari segi kuantitas masih belum didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya sehingga kinerja UMKM masih tertinggal. Ketertinggalan kinerja UMKM tersebut disebabkan terutama oleh kekurangmampuan UMKM dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Tingkat kinerja yang demikian juga berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses ke berbagai sumber daya produktif yang meliputi sumber-sumber permodalan, informasi, teknologi, pasar dan faktor produksi.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah perkembangan iklim usaha yang masih kurang mendukung yang disebabkan, antara lain, oleh (1) ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perizinan, dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi; (2) proses bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat; (3) lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM; dan (4) masih munculnya peraturan-peraturan daerah yang menghambat, termasuk pengenaan pungutan-pungutan baru kepada Koperasi dan UMKM sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Masih terbatasnya sumber daya financial juga merupakan masalah utama bagi usaha mikro. Usaha mikro yang bermodal kecil umumnya tidak berbadan hukum dan masih menerapkan manajemen yang sangat sederhana.

Oleh karena itu, usaha mikro ini sulit untuk memperoleh akses dari lembaga keuangan perbankan.

#### 2.3.6 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Terkait Koordinasi dengan Pusat dan Daerah Kabupaten/Kota

Program Pembangunan Provinsi Jambi diantaranya adalah untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif dan pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Jambi. Salah satu pola yang sesuai dengan pembangunan yang berorientasi kepada rakyat adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang berorientasi pada peningkatan partisipasi produktif masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi. Kegiatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada umumnya dan melibatkan masyarakat adalah koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah melalui berbagai sektor usaha antara lain sektor koperasi dan UMKM.

Pihak yang paling berperan dalam pengembangan koperasi dan UMKM dalam pembangunan ekonomi di Jambi adalah Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi di bidang Koperasi dan UMKM serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Guna mengoptimalkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam hal pembinaan terhadap koperasi dan UMKM yang ada di Jambi, serta dalam menyusun program dan kegiatan selalu berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI serta Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota dalam bentuk :

1. Melaksanakan rapat koordinasi pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam rangka sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan dengan dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota.

2. Mengikuti Bimbingan teknis, rapat penyusunan perencanaan, rapat teknis perencanaan, rapat regional, rapat koordinasi nasional dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan harapan terdapat sinergitas pembangunan antara pusat dan daerah, sehingga anggaran yang disediakan untuk pembangunan sector koperasi dan UMKM dapat dipergunakan secara optimal dan tepat sasaran dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi sesuai dengan Tugas dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat bidang pengembangan Koperasi dan UMKM dalam pelayanan kepada Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan

Selain dari hasil analisis di atas terdapat pula isu-isu penting lainnya yaitu :

- 1) Besarnya potensi Koperasi dan UMKM yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi;
- 2) Adanya permintaan produk-produk unggulan yang cukup tinggi;
- 3) Adanya peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan (insentif) bagi pengusaha;
- 4) Adanya akses kemudahan Perbankan dan pembiayaan lainnya bagi pelaku Koperasi dan UMKM;
- 5) Adanya lembaga-lembaga pendukung dalam pengembangan Koperasi, UMKM;
- 6) Adanya keanekaragaman produk UMKM yang tersebar;
- 7) Banyaknya usaha besar berpartisipasi dalam pembangunan.

- 8) Lemahnya koordinasi dengan lintas OPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Masyarakat, dan lain-lain;
- 9) Adanya pasar global, yang membuat persaingan semakin tajam;
- 10) Belum siapnya sumber daya manusia pelaku usaha dalam menghadapi pasar global;
- 11) Rendahnya Mutu Produksi UMKM atau Standar mutu produk masih sangat labil;

Didasari isu-isu tersebut maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Provinsi Jambi dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan potensi bidang Koperasi, UMKM untuk menangkap peluang pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri;
- 2) Meningkatkan Produktivitas pelaku Koperasi, UMKM;
- 3) Mensosialisasikan kepada seluruh lapisan sosial masyarakat bahwa sektor informal dan formal pada bidang Koperasi, UMKM dapat menjadi kekuatan ekonomi yang dahsyat, sehingga menarik pemodal untuk berinvestasi pada bidang ini.
- 4) Meningkatkan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku UMKM;
- 5) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendukung dalam mengembangkan Koperasi, UMKM;
- 6) Meningkatkan kapasitas/kompetensi Sumber daya pelaku Koperasi, UMKM dalam mendukung keanekaragaman produk;
- 7) Meningkatkan Kerjasama dengan usaha besar dalam mengembangkan Koperasi dan UMKM;
- 8) Meningkatkan Koordinasi Lintas OPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Masyarakat, dan lain-lain ;

- 9) Meningkatkan mutu produk UKMM sehingga mampu bersaing dalam era pasar global;
- 10) Mengembangkan potensi Koperasi dan UMKM dengan mempersiapkan SDM yang handal untuk menghadapi pasar global;
- 11) Meningkatkan Teknologi Produksi pelaku UMKM;

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Dinas Koperasi, UKM Tahun 2022 disusun berdasarkan atas Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan membandingkan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJM Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian target Renstra, dan target kinerja yang dicapai oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi, terkait dengan prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi.

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi harus dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian kebijakan prioritas Pembangunan Daerah. Sehingga dalam mendukung pencapaian kebijakan tersebut maka Dinas Koperasi, UKM menetapkan 8 (delapan) program prioritas yang terdiri atas 1 (satu) program pendukung dan 7 (tujuh) program pembangunan, serta menetapkan 12 Kegiatan dan 27 sub Kegiatan yaitu :

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
  - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



- 1.2.2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 1.4.2 Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
  - 1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.5.4 Pengadaan Mebel
  - 1.5.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.6.1 Penyediaan jasa Surat Menyurat
  - 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
  - 2.1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi
    - 2.1.1 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan

Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

3.1 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3.1.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan, Kepatuhan, Kestinambungan dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat

3.1.2 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel

4 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

4.1 Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

4.1.1 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi

5 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

5.1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

5.1.1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

6 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

6.1 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

6.1.1 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restruturisasi Usaha

6.1.2 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

- 6.1.3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
- 7 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
  - 7.1 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
    - 7.1.1 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan. Pertumbuhan Ekonomi , dan Pengentasan Kemiskinan
- 8 Program Pengembangan UMKM
  - 8.1 Pengembangan Usaha Kecil dan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
    - 8.1.1 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

Secara lengkap Review terhadap rancangan Awal RKPD tahun 2022 Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Pagu Indikatif	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Prov Jambi	Predikat AKIP Pemerintah Daerah		2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Predikat AKIP Pemerintah Daerah	
2.17.01.1.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersediannya Dokumen Perencanaan	149.041.450	2.17.01.1.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersediannya Dokumen Perencanaan	149.041.450
2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov Jambi	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	55.000.000	2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	55.000.000
2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov Jambi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	94.041.450	2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	94.041.450
2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan		2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan	
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov Jambi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.595.646.910	2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.595.646.910
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prov Jambi	Persentase PNS yang disiplin dan Mengikuti Pelatihan	15.000.000	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase PNS yang disiplin dan Mengikuti Pelatihan	15.000.000
2.17.01.1.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	2.17.01.1.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-
2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Prov Jambi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000	2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000

2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prov Jambi	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	723.658.861	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	723.658.861
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Prov Jambi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor yang Disediakan	29.137.090	2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor yang Disediakan	29.137.090
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	203.227.934	2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	203.227.934
2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prov Jambi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35.400.000	2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35.400.000
2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	71.811.837	2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	71.811.837
2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prov Jambi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-	2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-
2.17.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	2.17.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-
2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	384.082.000	2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	384.082.000
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov Jambi	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	90.000.000	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	90.000.000
2.17.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	2.17.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-
2.17.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	2.17.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-
2.17.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Prov Jambi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	2.17.01.1.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-
2.17.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov Jambi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90.000.000	2.17.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90.000.000
2.17.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	2.17.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	-
2.17.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	-	2.17.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	-

			Lainnya yang Disediakan					Lainnya yang Disediakan	
2.17.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	2.17.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-
2.17.01.1.07.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prov Jambi	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	694.377.000	2.17.01.1.07.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	694.377.000
2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	112.304.000	2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	112.304.000
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	250.532.000	2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	250.532.000
2.17.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.861.000	2.17.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.861.000
2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	328.680.000	2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	328.680.000
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prov Jambi	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.149.047.293	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.149.047.293
2.17.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov Jambi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	527.230.000	2.17.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	527.230.000
2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-
2.17.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang diperbaiki	-	2.17.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang diperbaiki	-
2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov Jambi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	116.404.000	2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	116.404.000
2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prov Jambi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	505.413.293	2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	505.413.293

2.17.01.1.09,10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2.17.01.1.09,10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-
2.17.01.1.09,11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2.17.01.1.09,11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-
<b>2.17.02</b>	<b>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</b>	Prov Jambi	Jumlah penyelesaian perizinan usaha simpan pinjam	125.000.000	<b>2.17.02</b>	<b>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</b>		Jumlah penyelesaian perizinan usaha simpan pinjam	125.000.000
2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prov Jambi	Jumlah penyelesaian perizinan usaha simpan pinjam	125.000.000	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah penyelesaian perizinan usaha simpan pinjam	125.000.000
2.17.02.1.01,01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Prov Jambi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	125.000.000	2.17.02.1.01,01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	125.000.000
			Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi bagi Pembina dan Pengurus/Pengelola KSP/USP Kab /Kota					Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi bagi Pembina dan Pengurus/Pengelola KSP/USP Kab /Kota	
			Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek Penyusunan Pelaporan Keuangan Koperasi Berbasis Aplikasi Akuntansi Bagi Pembina dan Pengurus /Pengelola Koperasi Kab/Kota					Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek Penyusunan Pelaporan Keuangan Koperasi Berbasis Aplikasi Akuntansi Bagi Pembina dan Pengurus /Pengelola Koperasi Kab/Kota	
			Sosialisasi sistem pelayanan perizinan usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang melalui OSS secara terintegrasi bagi pembina dan pengurus KSP/USP di wilayah Provinsi Jambi					Sosialisasi sistem pelayanan perizinan usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang melalui OSS secara terintegrasi bagi pembina dan pengurus KSP/USP di wilayah Provinsi Jambi	
			Jumlah Koperasi yang mengikuti Bimtek tentang Akuntansi Koperasi					Jumlah Koperasi yang mengikuti Bimtek tentang Akuntansi Koperasi	
			Jumlah Koperasi yang mengikuti Bimtek					Jumlah Koperasi yang mengikuti Bimtek	

			tentang Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi					tentang Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	
2.17.02.1,02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/		Jumlah Penyelesaian Perizinan Kantor cabang , Kantor cabang , Kantor Cabang Pembantu pembantu		2.17.02.1,02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/		Jumlah Penyelesaian Perizinan Kantor cabang , Kantor cabang , Kantor Cabang Pembantu pembantu	-
2.17.02.1,02.01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		2.17.02.1,02.01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-
2.17.02.1,02.01	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				2.17.02.1,02.01	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			-
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase Koperasi Berkinerja Baik	300.000.000	2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase Koperasi Berkinerja Baik	300.000.000
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Koperasi Yang Dinilai Kepatuhan	150.000.000	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Koperasi Yang Dinilai Kepatuhan	150.000.000
2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Prov Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	150.000.000	2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	150.000.000
2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Terbentuk Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta Akuntabel		Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	150.000.000	2.17.03.1.01,02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Terbentuk Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta Akuntabel		Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	150.000.000
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov Jambi	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	150.000.000	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	150.000.000



	dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
2.17.03.1.02.01	Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	Prov Jambi	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi		2.17.03.1.02.01	Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat		Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	-
<b>2,17,04</b>	<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>	Prov Jambi	<b>Persentase Koperasi sehat dan Cukup Sehat</b>	210.000.000	<b>2,17,04</b>	<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>		<b>Persentase Koperasi sehat dan Cukup Sehat</b>	210.000.000
2,17,04,1,01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prov Jambi	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	210.000.000	2,17,04,1,01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	210.000.000
2,17,04,1,01.01	Penilaian Permodalan,kualitas Aktiva, Produktif,Manajemen Efisiensi Likuiditas, Jadidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Prov Jambi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	210.000.000	2,17,04,1,01.01	Penilaian Permodalan,kualitas Aktiva, Produktif,Manajemen Efisiensi Likuiditas, Jadidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi		Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	210.000.000
2,17,04,1,01.02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi		Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan		2,17,04,1,01.02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi		Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan	-
<b>2.17.05</b>	<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	Prov Jambi	Persentase SDM Aparatur, Pelaku Usaha Koperasi dan UKM yang mendapatkan pelatihan setiap tahun	2.452.964.000	<b>2.17.05</b>	<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>		Persentase SDM Aparatur, Pelaku Usaha Koperasi dan UKM yang mendapatkan pelatihan setiap tahun	2.452.964.000
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prov Jambi	Persentase SDM Aparatur, Pelaku Usaha Koperasi dan UKM Yang Mendapatkan Pelatihan setiap tahun	2.452.964.000	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase SDM Aparatur, Pelaku Usaha Koperasi dan UKM Yang Mendapatkan Pelatihan setiap tahun	2.452.964.000
2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Prov Jambi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2.452.964.000	2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2.452.964.000
	Jumlah peserta pelatihan keterampilan teknis					Jumlah peserta pelatihan keterampilan teknis			
	Jumlah peserta pelatihan Perkoperasian					Jumlah peserta pelatihan Perkoperasian			

	Jumlah peserta pelatihan Kewirausahaan					Jumlah peserta pelatihan Kewirausahaan			
	Jumlah peserta pelatihan Manajerial					Jumlah peserta pelatihan Manajerial			
	Jumlah peserta pelatihan Teknologi Informasi					Jumlah peserta pelatihan Teknologi Informasi			
	Jumlah peserta pelatihan Kompetensi Perkoperasian					Jumlah peserta pelatihan Kompetensi Perkoperasian			
	Jumlah peserta pembekalan tenaga pendamping					Jumlah peserta pembekalan tenaga pendamping			
2.17.05.1.02	Pendidikan dan Latihan UKM yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				2.17.05.1.02	Pendidikan dan Latihan UKM yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			-
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM			-
<b>2.17.06</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	Prov Jambi	<b>Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi (119 Koperasi Aktif)</b>	704.999.930	<b>2.17.06</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>		<b>Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi (119 Koperasi Aktif)</b>	704.999.930
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prov Jambi		704.999.930	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			704.999.930
2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Prov Jambi	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	229.999.930	2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha		Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	229.999.930
			Jumlah Pelaksanaan Rakor Evaluasi Perkembangan Program LPDB					Jumlah Pelaksanaan Rakor Evaluasi Perkembangan Program LPDB	
			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kemitraan Usaha Koperasi					Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kemitraan Usaha Koperasi	
			Jumlah Pelaksanaan FGD Perlindungan dan penguatan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota					Jumlah Pelaksanaan FGD Perlindungan dan penguatan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota	
			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan usaha					Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan usaha	

			koperasi lintas daerah kabupaten kota					koperasi lintas daerah kabupaten kota	
			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pemasaran usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota					Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pemasaran usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota	
			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pendampingan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota					Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pendampingan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota	
2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Prov Jambi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	475.000.000	2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	475.000.000
			Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kelembagaan					Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kelembagaan	
			Jumlah Sosialisasi /penyuluhan tentang perkoperasian bagi masyarakat					Jumlah Sosialisasi /penyuluhan tentang perkoperasian bagi masyarakat	
			Jumlah bimtek manajemen perkoperasian bagi PPKL					Jumlah bimtek manajemen perkoperasian bagi PPKL	
			Jumlah Rakor Sinkronisasi Data KUMKM se Provinsi Jambi					Jumlah Rakor Sinkronisasi Data KUMKM se Provinsi Jambi	
			Jumlah kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi bagi koperasi berkualitas					Jumlah kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi bagi koperasi berkualitas	
			Peringatan Hari Koperasi Nasional tk nasional dan Provinsi					Peringatan Hari Koperasi Nasional tk nasional dan Provinsi	
			Rakor Pemetaan Pertumbuhan Koperasi Baru di wilayah Kab/Kota Se provinsi Jambi bagi Pembina					Rakor Pemetaan Pertumbuhan Koperasi Baru di wilayah Kab/Kota Se provinsi Jambi bagi Pembina	
			Jumlah dokumen data koperasi dan UMKM					Jumlah dokumen data koperasi dan UMKM	
2.17.06.1.01.03	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan		2.17.06.1.01.03	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	-

	Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
<b>2,17.07</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	Prov Jambi	<b>Persentase Peningkatan UMKM Binaan (72,126 UMKM)</b>	20.499.999,540	<b>2,17.07</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>		<b>Persentase Peningkatan UMKM Binaan (72,126 UMKM)</b>	20.499.999,540
2,17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku kKepentingan	Prov Jambi	<b>Persentase Peningkatan UMKM Binaan (72,126 UMKM)</b>	20.499.999,540	2,17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku kKepentingan		<b>Persentase Peningkatan UMKM Binaan (72,126 UMKM)</b>	20.499.999,540
2,17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Prov Jambi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	20.499.999,540	2,17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	20.499.999,540
			Jumlah pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan peningkatan kualitas Produk Unggulan /Andalan Provinsi Jambi					Jumlah pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan peningkatan kualitas Produk Unggulan /Andalan Provinsi Jambi	
			Jumlah pelaksanaan Kegiatan Desiminasi Sertifikasi Produk Halal					Jumlah pelaksanaan Kegiatan Desiminasi Sertifikasi Produk Halal	
			Jumlah pelaksanaan Kegiatan Desiminasi Perizinan BPOM					Jumlah pelaksanaan Kegiatan Desiminasi Perizinan BPOM	
			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan HKI Bagi UMKM					Jumlah Pelaksanaan Kegiatan HKI Bagi UMKM	
			Jumlah Pelaksanaan Rakor SHAT bagi UMKM					Jumlah Pelaksanaan Rakor SHAT bagi UMKM	
			Jumlah Pelaksanaan Pelaksanaan Rakor SIKP					Jumlah Pelaksanaan Pelaksanaan Rakor SIKP	
			Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan pelatihan peningkatan mutu produk/Pemasaran					Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan pelatihan peningkatan mutu produk/Pemasaran	

			berbasis teknologi (e-commerce)					berbasis teknologi (e-commerce)	
			Jumlah UMKM Penerima Bantuan Modal/ Peralatan					Jumlah UMKM Penerima Bantuan Modal/ Peralatan	
2,17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan		2,17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	
<b>2,17.08</b>	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	Prov Jambi	<b>Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan</b>	349.999.620	<b>2,17.08</b>	<b>Program Pengembangan UMKM</b>		<b>Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan</b>	349.999.620
2,17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Prov Jambi		349.999.620	2,17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			349.999.620
2,17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Prov Jambi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknolog	349.999.620	2,17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknolog	349.999.620
			Jumlah promosi /pameran yang diikuti					Jumlah promosi /pameran yang diikuti	
			Jumlah UKM yang di fasilitasi mengikuti pameran					Jumlah UKM yang di fasilitasi mengikuti pameran	
			Jumlah fasilitasi gelar produk bagi UMKM					Jumlah fasilitasi gelar produk bagi UMKM	
			Jumlah UKM yang di promosikan melalui media cetak /elektronik					Jumlah UKM yang di promosikan melalui media cetak /elektronik	
			Jumlah aplikasi promosi UKM					Jumlah aplikasi promosi UKM	
2,17.08.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM		Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum		2,17.08.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM		Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	
	Total	Prov Jambi		36.167.391.511					36.167.391.511

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat pada Tahun 2022 Jumlah Pagu Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi sebesar Rp. 36.167.391.511,- (tiga puluh enam milyar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sebelas rupiah). Dengan rincian :

- Belanja Operasi Rp. 36.059.734.604,-
- Belanja Modal Rp. 107.656.907,-

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangking berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

Tahun 2021 Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi tidak melaksanakan forum Organisasi Perangkat Daerah karena adanya refocusing pada kegiatan tersebut. sehingga usulan kegiatan dari kabupaten/kota dilaksanakan berdasarkan Forum Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021.

Sedangkan untuk Usulan DPRD Provinsi Jambi disinergikan dengan Program Dumisake yang terdapat di Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi berupa pemberian bantuan modal kerja bagi 426 UMK yang tersebar di 11 kabupaten/ Kota.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rancangan Awal RPJMN dirumuskan 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu :

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamalkan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam upaya peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM dalam 5 (lima) tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
- 2) Terwujudnya UMKM yang mampu berkontribusi secara optimal pada Peningkatan PDRB;
- 3) Terwujudnya Aparatur Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang profesional dan berkinerja baik;

Sementara itu, kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM diantaranya adalah :

- 1) Pengembangan sistem pendaftaran usaha UMKM yang mendukung pelaksanaan ijin usaha mikro dan kecil yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- 2) Pengembangan Lembaga Pembiayaan Pertanian, UMKM dan Koperasi;
- 3) Penguatan kelembagaan Pusat Diklat Koperasi dan UMKM di tingkat nasional dan penguatan fungsinya sebagai pusat pembinaan penyuluhan perkoperasian;
- 4) Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (PLUT) KUMKM di tingkat pusat dan daerah (provinsi, kabupaten dan kota);
- 5) Pengintegrasian Sistem Informasi Debitur (SID) untuk perbankan, KSP, LKM dan lembaga keuangan lainnya;
- 6) Penataan administrasi badan hukum koperasi yang terintegrasi di tingkat pusat dan daerah;
- 7) Pembentukan Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP);
- 8) Penyusunan kelembagaan penjaminan simpanan koperasi;
- 9) Peningkatan fungsi Lembaga Layanan Pemasaran (LPP) KUMKM sebagai trading house bagi produk KUMKM secara nasional;
- 10) Penguatan Pusat Inovasi UMKM, yang didukung sinergitas lembaga penelitian pemerintah dan swasta untuk mendorong inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh Koperasi dan UMKM;
- 11) Penguatan sinergi dan kerja sama antar lembaga/pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM.

Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran. Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku ekonomi, khususnya pada Koperasi dan UMKM, amat penting. Langkah ini sekaligus untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional yang selama ini dalam kondisi dualistik dan timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UMKM diharapkan menghantarkan penataan struktur



pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri. Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UMKM merupakan leader perekonomian Indonesia dan menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi adalah :

- 1) Meningkatkan bantuan permodalan dana bergulir bagi koperasi dan usaha kecil dari pemerintah;
- 2) Meningkatkan bantuan permodalan dari swasta dalam bentuk kemitraan usaha;
- 3) Meningkatkan kualitas pendidikan dan latihan keuangan pengurus koperasi dan pemilik usaha kecil;
- 4) Meningkatkan kompetensi bisnis pengurus koperasi dan pemilik usaha kecil;

Adapun program di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu

- 1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam,
- 2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi,
- 3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi,
- 4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian,
- 5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi,
- 6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM),
- 7) Program Pengembangan UMKM;
- 8) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025, peningkatan daya saing UMKM dan koperasi perlu diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Upaya peningkatan daya saing UMKM yang berkaitan dengan misi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan

melalui perbaikan produktivitas dan nilai tambah produk khususnya bagi usaha mikro yang sebagian besar mencakup masyarakat berpendapatan rendah. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, serta perkembangan usahanya secara berkelanjutan.

Di sisi lain, peningkatan daya saing UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui fasilitasi bagi UMKM untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional. Fasilitasi tersebut dapat mencakup peningkatan inovasi, penerapan standardisasi dan sertifikasi kualitas proses produksi dan produk, dan peningkatan jangkauan pasar, termasuk ekspor. UMKM juga dapat diperkuat perannya di pasar domestik melalui penurunan biaya transaksi dan promosi penggunaan produk dalam negeri.

Khusus untuk peningkatan daya saing koperasi, upaya-upaya yang perlu dilakukan yaitu mendorong koperasi menjadi lebih mandiri melalui peningkatan dan penguatan partisipasi anggota koperasi untuk mengembangkan usaha bersama. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan peran koperasi sebagai wadah bagi penciptaan efisiensi usaha, peningkatan posisi tawar, dan peningkatan jangkauan pemasaran bagi produk-produk yang dihasilkan oleh anggotanya. Dampak yang diharapkan yaitu peningkatan kesejahteraan anggota koperasi baik secara ekonomi maupun sosial yang selanjutnya akan berkontribusi pada pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan. Selain itu, perbaikan kinerja usaha anggota koperasi juga diharapkan dapat mendorong kemandirian koperasi yang berlanjut pada peningkatan daya saing koperasi.

Selain peningkatan partisipasi anggota, koperasi juga perlu diperkuat kelembagaannya. Hal ini dapat dilakukan melalui modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi sehingga dapat merespon perubahan pasar dengan cepat. Koperasi juga dapat diperkuat manajemenya untuk menjadi pengelola sentra dan organisasi klaster. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi juga perlu diperkuat melalui perluasan keterlibatan UMKM dan koperasi dalam jaringan produksi dan pemasaran, baik regional, nasional maupun internasional.

Perbaikan tata kelola dan kinerja kelembagaan UMKM dan koperasi menjadi faktor penentu dalam pemanfaatan peluang pengembangan kemitraan, termasuk yang berbasis inovasi, investasi dan ekspor. Penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi juga diharapkan dapat berdampak pada perbaikan struktur pelaku usaha

di Indonesia, terutama untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini penting untuk mengoptimalkan pengembangan bidang-bidang usaha tertentu yang akan lebih efisien untuk dijalankan dalam skala kecil dan menengah. UKM juga memiliki kapasitas yang lebih baik dibandingkan dengan usaha mikro terutama dalam merespon peluang investasi, kemitraan atau kerja sama usaha, dan perbaikan peraturan, serta perubahan pasar yang dinamis.

Penguatan UKM juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya tenaga kerja yang ada secara optimal. Dalam hal ini, UKM dapat menjadi avalis atau off taker bagi usaha mikro yang mendominasi populasi pelaku usaha di sektor-sektor primer, serta memfasilitasi pengolahan produk primer menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Peningkatan kapasitas UKM juga diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dunia usaha dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi, yang ditandai dengan keterbukaan dan peningkatan persaingan pasar. Berbagai upaya penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang berfokus pada pencapaian daya saing kompetitif berdasarkan kemampuan sumber daya alam, SDM dan Iptek.

Kerangka kebijakan yang digunakan dapat dirangkum dalam suatu skenario peningkatan daya saing UMKM dan koperasi dalam lima tahun ke depan seperti diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Kebijakan pemberdayaan UMKM diarahkan untuk meningkatkan skala UMKM dalam rangka penguatan pasar domestik dan pengembangan keunggulan global. Kebijakan difokuskan pada upaya-upaya:
  - a. peningkatan produktivitas UMKM terutama berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM), akses ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya, serta penyediaan insentif fiskal dan non fiskal;
  - b. peningkatan inovasi dan penerapan standarisasi proses produksi dan produk/jasa UMKM;
  - c. peningkatan kapasitas kelembagaan usaha melalui penguatan kemitraan berbasis rantai nilai dan rantai pasok; dan
  - d. peningkatan jangkauan pemasaran produk dan jasa UMKM;

2. Kebijakan pemberdayaan koperasi diarahkan untuk meningkatkan tata kelola usaha koperasi yang difokuskan pada upaya-upaya:
  - a. peningkatan dan penguatan kontribusi anggota dalam memajukan usaha koperasi sehingga terbangun kemandirian koperasi; dan
  - b. modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi dalam rangka memperkuat kapasitas koperasi untuk berperan secara optimal dalam pasar domestik dan internasional.

Skenario kebijakan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi ke depan juga disusun berdasarkan potensi yang dimiliki oleh UMKM dan koperasi. Potensi terbesar UMKM saat ini yaitu populasinya yang besar, serta karakteristik organisasi dan usahanya yang fleksibel. Populasi UMKM yang besar merupakan modal untuk berkontribusi pada pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan skala produksi dan pemasaran. Fleksibilitas organisasi, tata kerja dan pengelolaan usaha UMKM juga memberi kemudahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Kapasitas Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019, UMKM umumnya dibangun dari sumber daya lokal (bahan baku, pengetahuan, keterampilan, dan tenaga kerja) juga menjadikan usahanya dapat menghasilkan produk yang terjangkau bagi masyarakat. Potensi tersebut menjadikan UMKM dapat berkontribusi besar dalam penguatan pasar domestik, khususnya dalam penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Sementara itu sebagai organisasi yang berbasis anggota, koperasi dapat menggunakan kekuatan partisipasi anggotanya untuk membangun kemandirian dan kemajuan usaha. Koperasi juga dapat mengembangkan skala yang memadai untuk UMKM yang bergabung

menjadi anggotanya. Cara ini akan memungkinkan koperasi untuk meningkatkan efisiensi usaha bersama mulai dari pengadaan, produksi sampai pemasaran. Dengan misi ekonomi dan sosialnya, koperasi juga dapat berkontribusi pada peningkatan modal sosial masyarakat serta kesempatan kerja bagi masyarakat.

Pengembangan UMKM dan koperasi juga didukung ketersediaan payung hukum, sumber daya alam dan SDM. Struktur peraturan yang ada sudah memberikan koridor yang jelas mengenai penyediaan dukungan bagi perkembangan

UMKM dan koperasi ke depan. Ketersediaan sumber daya alam dan skala permintaan yang besar (populasi penduduk yang besar) juga menjadi faktor eksternal pendukung bagi perkembangan UMKM. Adanya budaya gotong-royong juga menjadi cikal bakal bagi perkembangan koperasi. Potensi UMKM dan koperasi juga dapat dilihat dari adanya dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, terkait pengembangan usaha baru dan penguatan UMKM dan koperasi diberbagai sektor dan wilayah.

Namun efektivitas penggunaan berbagai potensi dan sumber daya tersebut masih membutuhkan penanganan berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dan koperasi. Beberapa permasalahan umum yang perlu dicermati adalah sebagai berikut:

1. Struktur pelaku usaha nasional masih didominasi oleh usaha mikro yang informal dan memiliki akses ke sumber daya, kapasitas SDM, serta kontribusi yang terbatas;
2. Penurunan kontribusi UMKM dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) di sektor-sektor dengan jumlah UMKM yang besar yaitu sektor pertanian dan perdagangan. Kondisi ini juga menunjukkan kontribusi UMKM dalam meningkatkan nilai tambah di sektor-sektor produktif masih rendah;
3. Populasi dan kontribusi PDB usaha kecil dan menengah yang rendah mengkonfirmasi masalah missing middle dalam struktur pelaku usaha;
4. Kesenjangan yang melebar antara produktivitas per unit UMKM dan usaha besar, dan antar UMKM di berbagai sektor;
5. Partisipasi UMKM dalam ekspor masih rendah dan kontribusinya dalam ekspor terus mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir;
6. Kontribusi UMKM dalam investasi masih lebih rendah dibandingkan dengan usaha besar; dan
7. Koperasi belum berperan optimal dalam peningkatan efisiensi dan posisi tawar anggotanya.

Ketujuh permasalahan tersebut perlu ditangani secara komprehensif dengan memperhatikan masalah-masalah spesifik terkait SDM, produksi dan pemasaran, pembiayaan, kelembagaan dan iklim usaha.

### **3.2 Tujuan, dan Sasaran Renja**

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas
- 2 Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3 Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, agamis dan berkesetaraan gender.

Berangkat dari Tujuan Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi mendukung pencapaian tujuan kedua yaitu Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikator tujuan Pertumbuhan ekonomi.

Adapun tujuan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi adalah” ***Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas dan UMKM yang Produktif dan Mampu Berdaya Saing***”. Melalui upaya pemberdayaan koperasi dan UKM dengan berbagai program dan kegiatan yang mendukung peningkatan dan perkembangan usaha koperasi dan UMKM di Provinsi Jambi agar semakin maju dan berkembang serta berdaya saing sehingga masyarakat koperasi dan UMKM semakin sejahtera.

Selain daripada itu tujuan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi adalah ***“Mewujudkan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik.”***. Menuju organisasi pemerintah yang berkualitas dalam pelayanan dan kinerja organisasi yang akuntabel sehingga terwujud tata pemerintahan yang baik (good governance), kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang handal dan tingkat kepuasan masyarakat yang baik.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara riil oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih khusus dan terukur. Untuk itu, sasaran harus dibuat dengan jelas dan dapat diukur. Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi selama Tahun 2021-2026, dijabarkan pada tabel 3.1 :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE :				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas dan UMKM yang Produktif dan Mampu Berdaya Saing	Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	5,4%	5,6%	6%	6,7%	6,7%
		Terwujudnya UMKM yang Mampu Berkontribusi secara Optimal pada Peningkatan PDRB	Persentase Usaha Kecil Wirausaha menjadi	3,38%	6%	8%	10%	14%
2	Mewujudkan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik	Terwujudnya Aparatur Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik	Nilai SAKIP	71 (BB)	71,5 (BB)	72 (BB)	72,5 (BB)	81 (A)
			Nilai Kepuasan Masyarakat	86	87	88	88	88



**Tabel 3.2**

**Pohon Kinerja Sasaran**

**Pohon Kinerja Sasaran 1**

Visi	Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT							
Misi ke-2	Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah							
Tujuan ke -2 RPJMD	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat							
Sasaran 2.3 RPJMD	Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata							
IKU/IKD RPJMD	Persentase koperasi yang berkualitas							
Tujuan OPD	1. Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas dan UMKM yang Produktif dan Mampu Berdaya Saing							
Sasaran OPD	1. Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas							
Indikator Sasaran	1. Persentase Koperasi Berkualitas							
Program	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Kegiatan	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif,	Penilaian Kesehatan Koperasi	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian

	Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	undangan dan Terbatasnya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta akuntabel	Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar- Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi		Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
--	--	---	---	---	--	--	--	--

## Pohon Kinerja Sasaran 2

	ujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT		
ke-2	antapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah		
an ke -2 RPJMD	ulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat		
ran 2.3 RPJMD	ngkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata		
IKD RPJMD	entase koperasi yang berkualitas		
an OPD	ujudkan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas dan UMKM yang Produktif dan Mampu Berdaya Saing		
ran OPD	ujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas		
ator Sasaran	entase Usaha kecil menjadi wirausaha		
am	ram Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	ram Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	ram Pengembangan UMKM
tan	idikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	erdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	embangan Usaha Kecil dan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
Kegiatan	ngkatkan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	mbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan. Pertumbuhan Ekonomi , dan Pengentasan Kemiskinan	uksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

### 3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi untuk tahun 2022 telah merencanakan program dan kegiatan prioritas pembangunan sebagai berikut :

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
  - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1.2.2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 1.4.2 Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
    - 1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - 1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1.5.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1.6.1 Penyediaan jasa Surat Menyurat
    - 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - 1.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 1.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - 1.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
  - 2.1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi
    - 2.1.1 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 3 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
  - 3.1 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
    - 3.1.2 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
  - 3.2 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintah Daerah Kabupatern/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
    - 3.2.1 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat
- 4 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
  - 4.1 Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
    - 4.1.1 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi
- 5 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
  - 5.1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
    - 5.1.1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

- 6 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
  - 6.1 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
    - 6.1.1 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restruturisasi Usaha
    - 6.1.2 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
- 7 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
  - 7.1 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
    - 7.1.1 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan. Pertumbuhan Ekonomi , dan Pengentasan Kemiskinan
- 8 Program Pengembangan UMKM
  - 8.1 Pengembangan Usaha Kecil dan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
    - 8.1.1 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

Hasil yang diharapkan oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yaitu dapat terealisasikannya tujuan dan sasaran, serta kebijakan dan prioritas pembangunan bidang koperasi dan UMKM di Provinsi Jambi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi tahun 2021- 2026 yang merupakan turunan dari RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Secara lengkap rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2022 beserta proyeksi maju tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

TABEL 3.3

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022

Beserta Proyeksi Maju Tahun 2023

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai SAKIP		B				
2.17.01.1.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				165.000.000			189.750.000
2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah		2 Dokumen	55,000,000		2 Dokumen	63.250.000
2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan	110.000.000		2 Laporan	126.500.000
2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.530.631.494			10.960.226.218
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		80 Orang/Bulan	9.530.631.494		80 Orang/Bulan	10.960.226.218
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							190.900.000
2.17.01.1.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		135 paket	91.000.000		135 paket	104.650.000
2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		60 Orang	75,000,000		60 Orang	86.250.000
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				848.463.311			975.732.807
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		10 Paket	50.000.000		10 Paket	57.500.000
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	200.427.311		4 Paket	230.491.407

2.17.01.1.06,04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		400 Pkaet	41.536.000		400 Pkaet	37.766.400
2.17.01.1.06,05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		15 Paket	105.000.000		15 Paket	110.750.000
2.17.01.1.06,06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Paket	1.500.000		2 Paket	1.725.000.
2.17.01.1.06,08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			-			20.000.000
2.17.01.1.06,09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	450.000.000		1 Laporan	517.500.000
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		-	4.400.000.000		-	1.195.125.000
2.17.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2 Unit Mobil	850.000.000		2 Unit Mobil	500.000.000
2.17.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	-		-	700.000.000
2.17.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 Item	200.000.000		5 Item	250.000.000
2.17.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4 item	250.000.000		4 item	287.500.000
2.17.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 paket	2.500.000.000			
2.17.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Paket	500.000.000			
2.17.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1 paket	100.000.000		1 paket	1.400.000.000
2.17.01.1.07.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				743.200.000			854.680.000
2.17.01.1.08,01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	120.000.000		1 Laporan	138.000.000
2.17.01.1.08,02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	300.000.000		1 Laporan	345.000.000

2.17.01.1.08,03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	3.200.000		1 Laporan	3.680.000
2.17.01.1.08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	320.000.000		1 Laporan	368.000.000
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.018.844.000			1.171.670.600
2.17.01.1.09,01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		30 Unit	490.000.000		30 Unit	563.500.000
2.17.01.1.09,02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		-	-		-	-
2.17.01.1.09,05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di perbaiki		1 unit	100.000.000		1 unit	100.000.000
2.17.01.1.09,06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		70 unit	111,004,000		70 unit	127.645.600
2.17.01.1.09,09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	117.840.000		3 Unit	135.516.000
2.17.01.1.09,10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	200,000,000		1 Unit	100,000,000
2.17.01.1.09,11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	-		-	100.000.000
<b>2.17.02</b>	<b>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</b>	Jumlah penyelesaian perizinan usaha simpan pinjam		25 KSP/USP	441.077.532		27 KSP/USP	507.239.162
2.17.02.1,01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				441.077.532			507.239.162
2.17.02.1,01,01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam			441.077.532			457.239.162



		1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam						
		Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi bagi Pembina dan Pengurus/Pengelola KSP/USP Kab / Kota		-			-	
		Jumlah Koperasi yang mengikuti Bimtek tentang Akuntansi Koperasi		<u>22 Koperasi</u>			<u>22 Koperasi</u>	
		Jumlah Koperasi yang mengikuti Bimtek tentang Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi		<u>22 Koperasi</u>			<u>22 Koperasi</u>	
2.17.02.1.02,01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam						50.000.000
2.17.02.1.02,01	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik							
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Berkinerja Baik		45%	575.170.000		45%	675.610.000
2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat		-	-		-	50.000.000
2.17.03.1.01,02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Terbentuk Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel		20 Unit Usaha	289.005.000		20 Unit Usaha	310.805.000
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi		-	286.168.000		-	314.805.000
					-			-

2.17.03.1.02.01	Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi		20 Koperasi	286.168.000		20 Koperasi	314.805.000
<b>2.17.04</b>	<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>	<b>Persentase Koperasi sehat dan Cukup Sehat</b>			0.43 (47%)		0.43 (47%)	367.291.025
2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							367.291.025
2.17.04.1.01.01	Penilaian Permodalan, kualitas Aktiva, Produktif, Manajemen Efisiensi Likuiditas, Jadidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi			20 Unit Usaha		20 Unit Usaha	367.291.025
2.17.04.1.01.02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan			-		-	-
<b>2.17.05</b>	<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	Persentase SDM Aparatur, Pelaku Usaha Koperasi dan UKM yang mendapatkan pelatihan setiap tahun			<b>2.875.000.000</b>		<b>0.05</b>	3.306.250.000
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				<b>2.875.000.000</b>			3.306.250.000
2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			500 Orang (5%)		500 Orang (5%)	3.306.250.000
	Jumlah peserta pelatihan keterampilan teknis				150 orang		150 orang	
	Jumlah peserta pelatihan Perkoperasian				150 orang		150 orang	
	Jumlah peserta pelatihan Kewirausahaan				150 orang		150 orang	
	Jumlah peserta pelatihan Manajerial				150 orang		150 orang	
	Jumlah peserta pelatihan Teknologi Informasi				100 orang		100 orang	
	Jumlah peserta pelatihan Kompetensi Perkoperasian				84 orang		84 orang	
	Jumlah peserta pembekalan tenaga pendamping				19 orang		19 orang	
2.17.05.1.02	Pendidikan dan Latihan UKM yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM							
<b>2.17.06</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	<b>Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi (119 Koperasi Aktif)</b>			<b>2,69%</b>	1.539.400.000	3,6%	1.793.310.000
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					1.539.400.000		

.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					1.539.400.000		
2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha				623.400.000		566.910.000
		Jumlah Pelaksanaan Rakor Evaluasi Perkembangan Program LPDB			1 kali			
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kemitraan Usaha Koperasi			1 kali			
		Jumlah Pelaksanaan FGD Perlindungan dan penguatan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota			1 kali			
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pembiayaan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota			1 kali			
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pemasaran usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota			1 kali			
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pendampingan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota			1 kali			
		Jumlah Pelaksanaan Rakor Evaluasi Perkembangan Program LPDB			1 kali			
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kemitraan Usaha Koperasi			1 kali			
		Jumlah Pelaksanaan FGD Perlindungan dan penguatan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota			1 kali			
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pembiayaan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota			1 kali			
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pemasaran usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota			1 kali			
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pendampingan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota			1 kali			
2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			936.000.000			976.400.000
		Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kelembagaan		1 kali			1 kali	

		Jumlah Sosialisasi /penyuluhan tentang perkoperasian bagi masyarakat		5 kali			5 kali	
		Jumlah bimtek manajemen perkoperasian bagi PPKL		1 kali			1 kali	
		Jumlah Rakor Sinkronisasi Data KUMKM se Provinsi Jambi		1 kali			1 kali	
		Jumlah kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi bagi koperasi berkualitas		1 kali			1 kali	
		Peringatan Hari Koperasi Nasional tk nasional dan Provinsi						
		Rakor Pemetaan Pertumbuhan Koperasi Baru di wilayah Kab/Kota Se provinsi Jambi bagi Pembina						
		Jumlah dokumen data koperasi dan UMKM		1 dokumen			1 dokumen	
<b>2,17.07</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>Persentase Peningkatan UMKM Binaan (72,126 UMKM)</b>		19,6%	41.391.910.000		19,6%	41.600.700.000
2,17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku kKKeperluan				41.391.910.000			41.391.910.000
2,17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			40.000.000			40.000.000
		Jumlah pelaksanaan Kegiatan Desiminasi Sertifikasi Produk Halal		100 orang			100 orang	
		Jumlah pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan peningkatan kualitas Produk Unggulan /Andalan Provinsi Jambi		100 orang			100 orang	
		Jumlah pelaksanaan Kegiatan Desiminasi Perizinan BPOM		1 kali			1 kali	
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan HKI Bagi UMKM		1 kali			1 kali	
		Jumlah Pelaksanaan Rakor SHAT bagi UMKM		1 kali			1 kali	
		Jumlah Pelaksanaan Rakor SIKP		1 kali			1 kali	
		Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan pelatihan peningkatan mutu produk/Pemasaran berbasis teknologi (e-commerce)		1 kali			1 kali	
		Jumlah UMKM Penerima Bantuan Modal/ Peralatan		1500			1500	
2.17.06.1.01.03	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup						

	Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						
2,17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan		300 orang	1.391.910.000		300 orang	1.600.700.000
<b>2,17.08</b>	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan</b>		0.07	661.250.000		0.08	780.437.500
2,17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah				661.250.000			780.437.500
2,17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		100 Unit Usaha	661.250.000		100 Unit Usaha	780.437.500
		Jumlah promosi /pameran yang diikuti		3 kali			3 kali	
		Jumlah UKM yang di fasilitasi mengikuti pameran		4 UKM			4 UKM	
		Jumlah fasilitasi gelar produk bagi UMKM		2 kali			2 kali	
		Jumlah UKM yang di promosikan melalui media cetak /elektronik		2 UMKM			2 UMKM	
		Jumlah aplikasi promosi UKM						
2,17.08.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum						

## BAB IV

### RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN

Rencana kerja perubahan dan pendanaan tahun 2022 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Adapun rincian program kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Program Kegiatan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi  
Tahun 2022

Kode	Program dan Kegiatan	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	6	7
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	36.167.391.511	
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.014.450	
2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55,000,000	
2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	94.041.450	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.595.646.910	
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.595.646.910	
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000	
2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	15,000,000	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	723.658.861	

2.17.01.1.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	29.137.090	
2.17.01.1.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	203.227.934	
2.17.01.1.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.400.000	
2.17.01.1.06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	71.811.837	
2.17.01.1.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	384.082.000	
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.000.000	
2.17.01.1.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000	
2.17.01.1.07.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	694.377.000	
2.17.01.1.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	112.304.000	
2.17.01.1.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.532.000	
2.17.01.1.08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.861.000	
2.17.01.1.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	328.680.000	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.149.047.293	
2.17.01.1.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	527.230.000	
2.17.01.1.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.404.000	
2.17.01.1.09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	505.413.293	
<b>2.17.02</b>	<b>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</b>	125.000.000	
2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	125.000.000	
2.17.02.1.01.0 1	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	125.000.000	

<b>2.17.03</b>	<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>300.000.000</b>	
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	300.000.000	
2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Terbentuk Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta Akuntabel	150.000.000	
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	150.000.000	-
2.17.03.1.02.01	Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	150.000.000	
<b>2.17.04</b>	<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>	<b>210.000.000</b>	
2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	210.000.000	
2.17.04.1.01.01	Penilaian Permodalan, kualitas Aktiva, Produktif, Manajemen Efisiensi Likuiditas, Jadidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	210.000.000	
<b>2.17.05</b>	<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>2.452.964.000</b>	
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<b>2.452.964.000</b>	Anggaran berasal dari DAK Non Fisik yang bertujuan untuk meningkatkan SDM Pembina, Pengurus Koperasi serta Pelaku UMKM
2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	<b>2.452.964.000</b>	
<b>2.17.06</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	<b>704.999.930</b>	
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya	<b>704.999.930</b>	



	Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajumen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	229.999.930	
2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	475.000.000	
<b>2,17.07</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	20.499.999.540	Terdapat program Dumisake berupa bantuan modal kerja bagi UMKM sebanyak 1500
2,17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku kKKepentingan	20.499.999.540	Jumlah anggaran Dumisake sebesar 20 Milyar
2,17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	20.499.999.540	Kegiatan dilaksanakan pada APBD-P karena adanya perubahan rekening, semula Rekening bansos menjadi Rekening Belanja Barang dan Jasa
<b>2,17.08</b>	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	349.999.620	
2,17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	349.999.620	
2,17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	349.999.620	

Dari Tabel 4.1 pada Perubahan Renja Tahun 2022 Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi melaksanakan 8 Program 15 kegiatan dan 26 sub kegiatan , pagu sebesar Rp. 36.167.391.511, - . Pada Perubahan Renja tahun 2022, Dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp. Dengan rincian sebagai berikut :

1. kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Perubahan Renja Tahun 2022, Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi mengajukan usulan tambahan sebesar Rp.666.931.320,-
  2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebesar Rp. 265.191.947,-
  3. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik sebesar Rp. 7.207.502,-
- Serta melakukan pergeseran anggaran pada beberapa sub kegiatan yaitu :
1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 21.850.000,- (Berkurang)
  2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Fungsinya Rp. 9.700.000,- (Bertambah)
  3. Penyediaan dan Peralatan Kantor Rp. 24.629.870,- (Bertambah)
  4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 8.268.722,- (Bertambah)
  5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 205.420.079,- (Bertambah)
  6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 14.292.047,- (Berkurang)
  7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan Rp. 10.390.000,- (Berkurang)
  8. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 10.866.693,- (berkurang)

## BAB IV

### RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN

Perubahan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 di lingkup Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022. Perubahan Awal Renja Dinas Koperasi, UKM Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi tahun 2021-2026, telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, UKM dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diemban oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rancangan awal Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi. Semoga Perubahan Renja Dinas Koperasi, UKM Tahun 2022 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Provinsi Jambi tahun 2022. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Ditetapkan di: Jambi

Tanggal : Juli 2022

Kepala Dinas,



HAMDAN, SH. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630421 198503 1 008